

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018. Sampel penelitian diambil menggunakan metode *purposive sampling* dan menghasilkan 40 sampel perusahaan dengan total 130 observasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, analisis data dan interpretasi, hasil analisis adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa investor kepemilikan keluarga belum mematuhi adanya peraturan perpajakan di Indonesia sehingga melakukan adanya tindakan pajak agresif
2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa investor kepemilikan institusional sudah mematuhi adanya peraturan perpajakan di Indonesia.
3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa investor

kepemilikan manajerial sudah mematuhi adanya peraturan perpajakan di Indonesia

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018 terdapat beberapa saran yang berkaitan dengan masalah yang terjadi, antara lain :

1. Kepemilikan keluarga sebaiknya sebagai wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
2. Kepemilikan institusional diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan yang lebih besar sehingga dapat menghalangi perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif.
3. Sebaiknya adanya kepemilikan manajerial di perusahaan, maka perusahaan tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan tidak mengesampingkan kepentingan para pemegang saham minoritas.